**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peranserta seluruh potensi masyarakat. Agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancar diperlukan adanya hubungan yang selaras, serasi dan berimbang antara pemerintah dengan masyarakat. Pembangunan Nasional merupakan suatu pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah.

Pelaksanaan pembangunan nasional perlu dana yang cukup besar untuk membiayai pengeluaran rutin proyek pembangunan. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah yang terpadu dan serasi mewujudkan pembangunan nasional yang berwawasan nusantara. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dikelola secara efektif dan esfisien. Kemampuan keuangan suatu daerah dilihat dari besar kecilnya realisasi PAD.Berdasar Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi tersebut Pajak Daerah menurut wilayah pemungutannya dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi. Yang terdiri dari :

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) atau yang sekarang berganti menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) yang menjadi dinas yang mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah menurut wilayah pemungutannya dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi. Yang terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) atau yang sekarang berganti menjadi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengahmerupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai intansi penghasil dan pemungut pendapatan daerah.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah yang di kelola oleh DPPAD adalah Pajak Daerah. Sedangkan dari sektor Pajak Daerah yang sangat dominan dan memiliki peran paling besar saat ini terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Berdasarkan laporan realisasi pendapatan daerah DPPAD Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2015 penerimaan pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor (PKB) mempunyai potensi yang paling tinggi untuk penerimaan PAD. Pajak kendaraan bermotor dipungut atas kepemilikan dan atau kepenguasaan kendaraan bermotor sekaligus menjadi obyek pajak, dan subyek pajaknya yakni orang pribadi maupun badan selaku pemilik kendaraan bermotor.

Berdasarkan PP No 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah definsi kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat, dan digerakan oleh peralta teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi energy tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat da alat-alat besar yang digerakkan. Termasuk dalam obyek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan semua jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industry, perdagangan, dan atau penguasaan kendaraan bermotor meliputi kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah provinsi yang bersangkutan; kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor di daerah provinsi selama jangka waktu tertentu, misalnya 90 hari berturut-turut, alat-alat berat dan alat-alat besar seperti; tractor, wheel loader, log loader, skyder, shovel, motor grader, excavator, back hoe, vibrator, compactor, scraper serta jenis kendaraan darat lainnya seperti kereta gandeng.

Meskipun PKB menjadi penopang utama PAD namun masih terdapat beberapa permasalahan proses pembayaran PKB. Salah satu masalah yang saat ini perlu adanya solusi atau jalan keluar adalah penunggakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dimana selama kurun waktu 5 (lima) tahun, jumlah tunggakan PKB semakin meningkat.Berdasar Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara umum tunggakan PKB timbul atau ditetapkan pada saat berakhirnya masa pajak kendaraan bermotor dan wajib pajak belum melakukan pembayaran PKB.

Salah satu upaya yang dilakukan yang dilakukan oleh DPPAD dalam penanggulangan permasalahan penunggakan pajak kendaraan bermotor adalah dengan kegiatan Optimalisasi Pajak Daerah melalui kegiatan menyampaikan surat ketetapan pajak daerah, penagihan dan memberikan peringatan kepada wajib pajak. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan secara Door to Door. Door to Door dengan mendatangi langsung ke rumah wajib pajak. Kegiatan ini adalah tindak lanjut dari surat edaran Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No: 378/0638 tanggal 8 Januari 2014 tentang Anggaran kegiatan bidang pajak pada tahun anggaran 2014 berkaitan dengan Kegiatan Operasional potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Pada “*Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah No: 973/7630 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*” merupakan pedoman bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah yang berisi syarat, jenis, cara pemungutan serta denda atau sanki penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan menjadi perhatian khusus Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor, diantaranya dengan kegiatan Operasional Door To Door.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian pada Dinas Pendaptan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah dengan judul “***TINJAUAN KEGIATAN DOOR TO DOOR TERHADAP PEMBAYARAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PENDAPATAN dan PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH*** ”

## 1.2 Ruang Lingkup

Adanya keterbatasan waktu dan tenaga yang berbanding dengan jumlah materi yang banyak, maka penulis memberikan batasan masalah dalam tugas akhir agar lebih fokus pada topik yang dipilih. Adapun pembatasan masalah yang dipilih adalah pelaksanaan kegiatan *Door To Door* yang pada akhirnya didapat potensi piutang tertagih dan tidak tertagih.

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

### 1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari disusunnya Tugas Akhir (TA) ini antara lain :

1. Mengetahui secara langsung tentang pelaksanaan kegiatan Door To Door dalam penanganan piutang Pajak Kendaraan Bermotor dari mulai pencetakan Surat Ketetapan Pajak Daerah Secara Jabatan (SKPDPJ), penagihan, peringatan, sampai dengan Pelaporan .
2. Efektifitas pelaksanaan kegiatan Door To Door terhadap penanganan piutang PKB.

### 1.3.2 Kegunaan Penulisan Kegunaan dari disusunnya Tugas Akhir (TA) ini antara lain :

1. Bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagai bahan kajian dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Door to Door terhadap efektifitas penanganan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi masyarakat adalah meningkatkan kesadaran dalam pembayaran PKB dan mengetahui secara jelas mekanisme serta manfaat dari kegiatan Door To Door.
3. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya penanganan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pembangunan daerah.
   1. **Metode Pengumpulan Data**
      1. **Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam melaksanakan penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data (DermawanWibisosno, 2013:51). Penulis memperoleh data melalui dokumen dari Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di dapat dan di simpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masalalu/historis (DermawanWibisono, 2013:154). Data sekunder dalam tugas akhir ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature, dan bacaan yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir.

### Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan yang dilakukan penulis untuk mendapatkan data dan bahan yang dibutuhkan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubunganya dengan masalah yang dipecahkan (M.Nazir, Metode Penelitian, 1988). Penulis memperoleh data melalui referensi yang berisikan tentang perpajakan baik teori ataupun kasus-kasunya, Undang-Undang Perpajakan, dan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Wawancara

Wawancara personal adalah komunikasi langsung dimana berada dalam situasi bertatap muka dan melakukan proses tanya jawab secara langsung dengan responden (DermawanWibisono, 2013:118). Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotordi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

* 1. **Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai apa yang disampaikan oleh penulis dalam Tugas Akhir ini, maka perlu disampaikan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Berisi Latar Belakang, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN dan PENGELOLAAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Berisi Sejarah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Jawa Tengah, Visi Misi dan Tupoksi, Struktur Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.

**BAB III TINJAUAN KEGIATAN OPERASIONAL DOOR TO DOOR TERHADAP PEMBAYARAN PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI JAWA TENGAH**

Berisi tentang Pengertian Door To Door, Dasar Kegiatan Door To Door, Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Door to Door, Penanganan Tunggakan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Sebelum dan Sesudah Adanya Kegitan Door to Door, Kendala dan Hasil Kegiatan Door To Door

**BAB IV PENUTUP**

Berisi kesimpulan tentang kegiatan Operasional Door To Door terhadap pembayaran tunggakan piutang Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah.